BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kewirausahaan menjadi perhatian para pengambil keputusan di berbagai wilayah. Kewirausahaan dipandang sebagai suatu kegiatan yang mempunyai potensi menciptakan dan meningkatkan perumbuhan lapangan kerja. Masih banyak daerah yang belum menyadari tentang pentingnya sektor kewirausahaan menciptakan lapangan kerja. Di berbagai negara peranan sektor kewirausahaan menciptakan lapangan kerja sudah mendapat pengakuan. Penelitian di Amerika menunjukkan 25 perusahan mampu mencipatakan 1,4 juta lapangan kerja (McQuaid, 2003). Banyak negara menyadari bahwa jumlah perusahaan yang tumbuh cepat menjadi kunci penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu sektor kewirausahaan perlu diberi perhatian dan dilindungi agar sektor kewirausahaan terus berkembang sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan lebih kecil.

Keterkaitan antara turunnya tingkat pengangguran dengan kewirausahaan sudah diamati para ahli sejak lama. Tingkat pengangguran suatu wilayah mempunyai korelasi negatif dengan perkembangan kewirausahaan di wilayah tersebut. Wilayah yang mempunyai tingkat pengangguran rendah mempunyai tingkat kewirausahaan yang tinggi. Mereka mendapati bahwa jika individu menganggur dan prospek masuk lapangan kerja sulit maka mereka cenderung membangun usaha sendiri. Hal ini berarti kewirausahaan suatu wilayah berkembang karena seseorang tidak ingin menjadi pengangguran. Dengan demikian, para pelaku usaha kecil menengah (UKM) bermuculan untuk mendorong perekonomian yang lebih baik, dimana kehadiran pelaku usaha atau wirausahawan baru memulai usaha dalam skala kecil (Suryana, 2019, hal. 1).

Banyak penelitian yang mengidentifikasi kompetensi kewirausahaan, seperti kompetensi finansial (Hrehová, Daniela, & Ilečko, 2016, hal. 133). Kompetensi finansial yaitu memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, mengatur pembelian, penjualan, pembukuan, dan perhitungan rugi dan laba. Pembukuan keuangan dalam kegiatan usaha memiliki peran yang penting untuk mengontrol seberapa banyak pengeluaran dan pemasukan setiap waktu tertentu misalnya perbulannya (Ika, 2017).

Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM menjadi alasan bagi UMKM untuk tidak melakukan pembukuan secara akuntansi. Banyak kasus-kasus para UMKM yang tidak melakukan pembukuan dengan benar atau bahkan tidak sama sekali, mengakibatkan mereka juga tidak mengetahui perkembangan usahanya (Murtiningtyas, 2013). Terlebih lagi bentuk UMKM yang lebih didominasi perusahaan perseorangan mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Bentuk perusahaan perseorangan juga menyebabkan pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usahanya seringkali juga tidak dilakukan.

Pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usaha seharusnya menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) mengenai konsep kesatuan usaha (Economic Entity Concept) yang menyatakan bahwa seharusnya entitas (dalam hal ini UMKM) harus dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Implikasinya adalah hubungan antara UMKM dan pemilik diperlakukan sebagai transaksi antara dua pihak yang terpisah. Konsep ini penting untuk kelangsungan hidup UMKM sendiri. Pemilik usaha seringkali bingung menentukan keuntungan yang diraih apabila tidak dilakukan pemisahan keuangan. Lebih parah lagi terjadi apabila tidak terdapat kejelasan uang yang digunakan untuk kegiatan operasional usaha dengan kegiatan pribadi pemilik usaha.

Tak dapat dipungkiri, salah satu yang menjadi masalah utama dalam pemisahan keuangan bagi UMKM adalah saat adanya penggunaan barang modal ataupun uang yang berasal dari kegiatan usaha bagi kebutuhan pribadi pemilik. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan pengelolaan dana. Ketidakberesan pengelolaan dana seringkali menjadi pemicu terjadinya kegagalan UMKM. Para pelaku UMKM memang perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan baik secara finansial dan non finansial (Irawan, 2013).

Proses pencatatan keuangan biasanya sering dikenal dengan proses pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Proses ini kemudian ditutup dengan menyusun laporan keuangan untuk satu periode tertentu. Adapun manfaat pembukuan bagi pelaku usaha adalah 1) memisahkan aset bisnis dengan pribadi, sehingga meminimalkan resiko bisnis ke dalam kehidupan pribadi; 2) acuan penting dalam pegambilan keputusan untuk memastikan apakah kondisi keuangan dalam keadaan sehat, krisis, atau bangkrut; 3) melihat jumlah keuntungan; 4) laporan ke pihak luar yang digunakan untuk meninjau prospek bisnis di masa yang akan datang.

Manfaat dari pembukuan menurut Nurhayati (2015, hal. 13) yaitu: melindungi uang bisnis yang dikelola, mengontrol ke mana uang dibelanjakan, menganalisis sumber penghasilan, mengetahui perkembangan usaha yang dikelola, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Menurut Farid & Sudono (2011, hal. 2) yang dimaksud dengan laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat financial. Adapun salah satu tujuan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, hal. 4) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, maka pencatatan pembukuan memiliki peranan penting bagi para calon pelaku wirausaha dalam menjalankan usahanya.

Dalam menjalankan usaha, selain pencatatan pembukuan yang menjadi bagian integral dalam wirausaha diperlukan juga pengawasan dalam proses berjalannya usaha. Pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai perencanaan, perintah dan aturan yang ada (Fayol, 2016). Salah satu tujuan dari pengawasan yaitu melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan usaha diperlukan catatan pembukuan serta pengawasan untuk mengontrol jalannya suatu wirausaha

Kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang karena hal itu dapat dipelajari (Shalahuddin, Maulana, & Eriyani, 2018, hal. 9). Penyandang disabilitas termasuk di antara mereka yang bisa mengambil kesempatan untuk berwirausaha dan fenomena yang terjadi sekarang jumlah penyandang disabilitas yang berwirausaha mungkin jumlahnya hampir lebih dari dua kali individu yang tidak memiliki hambatan (Angelocci, Lacho, Lacho, & Galle, 2008, hal. 1). Haenudin (2013, hal. 53) mengemukakan bahwa orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Meski memiliki gangguan komunikasi dan bahasa, tunarungu memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan individu pada umumnya (Frend & Bursuck, 2012, hal. 187). Dengan demikian, ketunarunguan bukanlah menjadi kendala bagi seorang individu untuk menjadi seorang wirausahawan.

Seorang individu untuk menjadi seorang wirausahawan perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pembukuan sebelum memulai usahanya. Pengetahuan dasar mengenai pembukuan akan menjadi bagian fundamental sebelum akhirnya tunarungu benar-benar terjun dalam kewirausahaan. Dalam pandangan ini, memperoleh keterampilan kewirausahaan telah menjadi pilihan terbaik bagi tunarungu (Oyewumi & Adeniyi, 2013, hal. 129).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di SLB-B Karya Ibu Kota Palembang, ditemukan suatu kegiatan usaha mikro yang di dalam pengelolaannya memberdayakan tunarungu pasca sekolah dalam penggerak berjalannya usaha tersebut. Kegiatan ini berupa kantin, dimana tunarungu ditugaskan untuk melakukan pengelolaan kantin dimulai dari berbelanja, sampai dengan melayani konsumen dalam prosesnya. Berdasarkan pengamatan awal tunarungu tampak terampil dalam melakukan pengelolaan, baik dalam memasak makanan, melakukan pelayanan terhadap konsumen yang rata-rata orang tua siswa SLB, guru, serta siswa dari SLB. Dalam pelaksanaannya tidak tampak permasalahan, namun ketika ditanyakan berapa keuntungan dan modal harian untuk kepentingan kantin, tungarungu tidak mampu menjawabnya. Permasalahan ini nampak saat dilakukan studi pendahuluan adalah ketidakmampuan tunarungu dalam membuat pencatatan keuangan sebagai bentuk pelaporan kepada pengawas terkait pengeluaran dan pemasukan berdasarkan transaksi yang terjadi di kantin. Akibatnya, berdasarkan

wawancara kepada tunarungu, diperoleh terdapatnya pencampuran uang pribadi tunarungu dalam mencukupi modal harian untuk berbelanja keperluan kantin setiap hari. Keadaan ini terjadi karena menurut anak uang yang diberikan oleh guru pengawas tidak sepenuhnya mencukupi dan hal ini tidak diketahui oleh pengawas yang berimpas pada pembagian keuntungan setiap akhir bulan tidak menguntungkan kepada tunarungu karena penambahan modal yang dilakukan dalam kesehariannya tidak terhitung.

Selanjutnya adanya guru yang berperan sebagai pengawas juga tidak mengetahui hal tersebut setelah dikonfirmasi kepada guru pengawas tentang uang tunarungu yang terpakai, karena guru hanya menerima uang setoran dari tunarungu setiap kantin tutup, dan tidak ada laporan berapa barang yang habis, sehingga untuk berbelanja guru hanya mentaksir tanpa ada perhitungan dan pencacatan pasti, selain itu anak juga tidak pernah menyatakan kalau uang berbelanjanya kurang. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip pengawasan dalam proses usaha, dimana menurut Fayol (dalam Sunaengsih, 2017, hlm. 66) pengawasan terdiri dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. Artinya proses pengamatan dilakukan dari pelaksanaan seluruh kegiatan orgnisasi untuk menjamin agar dimana pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2014).

Tentunya kondisi ini tidak boleh terus terjadi, karena akan merugikan salah satu pihak serta akan sulit berkembang usaha yang dilakukan. Kemampuan tunarungu yang sudah kompeten dalam pengelolaan kantin harusnya dibekali juga dengan kemampuan finansial yaitu pencacatan. Pemakaian uang pribadi yang dapat merugikan anak tunarungu dalam pembagian hasil tidak akan terjadi apabila tunarungu dibekali cara menyusun pembukuan keuangan, dimana berdasarkan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usaha seharusnya menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Menurut Murtiningtyas (2013), pelaku usaha yang tidak melakukan pembukuan dengan benar atau bahkan tidak sama sekali, mengakibatkan mereka juga tidak mengetahui perkembangan usahanya.

Berdasarkan kondisi yang ditemui pada studi pendahuluan dapat disimpulkan permasalahan yang dialami oleh anak tunarungu terjadi karena tidak adanya

pencatatan pembukuan keuangan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan, kondisi ini diakibatkan karena tidak adanya pembekalan tentang ilmu pencatatan pembukuan yang diberikan di sekolah sehingga dia tidak dapat melaporkan arus kas harian kepada pengawas, sehingga mengakibatkan kerugian pada tunarungu dalam berwirausaha. Oleh karena itu dibutuhkan pembuatan program pendampingan pencatatan keuangan bagi tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Terkait dengan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka pertanyaan dalam penelitian ini :

1.2.1 Bagaimana kondisi objektif pencatatan keuangan sederhana tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu?manfaat

1.2.2 Bagaimana program pendampingan pencatatan keuangan bagi tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu?

1.2.3 Apakah program pendampingan pencatatan keuangan sederhana bagi tunarungu di SLB-B Karya Ibu hasilnya baik?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan program pendampingan pencatatan keuangan bagi tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu.

1.3.2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui kondisi objektif pencatatan keuangan tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu.
b. Mengetahui program pendampingan pencatatan keuangan bagi tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu.
c. Melakukan hasil uji coba dalam program pendampingan pencatatan keuangan bagi tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teorit

a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran tentang pendampingan pencatatan/ pembukuan sederhana memberikan kontribusi terhadap kemandirian tunarungu dalam berwirausaha.

b. Sebagai pengembangan ilmu di bidang pendidikan kebutuhan khusus yang berkaitan dengan pendidikan serta layanan bagi tunarungu pascasekolah.

1.4.2 Manfaat Praktik

a. Bagi siswa tunarungu pascasekolah

Dapat menjadi bekal dalam membuat pencatatan/ pembukuan sederhana dalam menjalankan usaha.

b. Bagi Guru

Sebagai referensi untuk guru dalam memberikan pendampingan pencatatan/ pembukuan sederhana bagi siswa tunanetra pascasekolah serta melakukan pengawasan langsung terhadap keberlangsungan program.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini yaitu terdapat lima bab, sebagai berikut:

1.5.1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjadikan dasar dilakukan penelitian. Rumusan masalah penelitian berguna untuk menunjukkan aspek apa saja yang ingin diungkap dalam penelitian. Selain itu, adapula tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan apa yang dimaksud dan mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, struktur organisasi disertasi berisi tentang urutan penulisan dari setiap bab, dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir.

1.5.2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ke dua yaitu kajian pustaka yang mencakup beberapa poin yang berkaitan dengan rinci konsep ketunarunguan, hakikat keterampilan vokasional bagi tunarungu, konsep kewirausahaan, serta konsep pembukuan.

1.5.3. Bab III Metode Penelitian

Bab ke tiga merupakan metode penelitian yang mencakup, desain penelitian, metode penelitian, lokasi dimana peneliti melakukan penelitian dan subjek penelitian yang menjelaskan siapa saja yang menjadi informan dalam penelitian. Selain itu teknik pengumpulan data disajikan pada bab tiga ini yakni sebagai cara yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis data.

1.5.4. Bab IV Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ke empat mencakup hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu kondisi objektif pencatatan keuangan tunarungu pasa sekolah di SLB-B Karya Ibu; program pendampingan pencatatan keuangan bagi tunarungu pascasekolah di SLB-B Karya Ibu; dan hasil program pendampingan pencatatan keuangan sederhana bagi tunarungu di SLB-B Karya Ibu.

1.5.5. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab terakhir adalah bab ke lima yang mencakup keseluruhan pembahasan dari penelitian dan dirangkum dengan kesimpulan, saran, dan rekomendasi dan hal-hal yang ditemukan oleh penulis selama penelitian dilaksanakan.